KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA TANAM PAKSA (1830-1870)

Romadi
Dosen Jurusan Sejarah FIS Unnes
Kampus Sekaran Gunungpati Semarang Kode Pos 50229

Abstrak

After Napoleon's defeat in the Coalition War in Europe, parts of Indonesia which was originally colonized by the British returned to the Netherlands in 1817. Although the Netherlands applied a change in the politics of colonization, but still comes up a lot of Inodesian's resistance. Among the resistances are Pattimura Resistance in the Moluccas (1817), Imam Bonjol in Minangkabau (1821-1833), Prince Diponegoro in Java (1825-1830) and so on. As a result of the resistance, Dutch spent lot to put it down. Besides, the political upheaval that occurred in Europe and the Dutch efforts to build its level equal with other European countries led the Dutch to politics that is able to exploit the wealth of Indonesian earth quickly. Among the political measures adopted is Forced Planting. This paper presented in a descriptive analytical model attempts to bring back a picture of Indonesian society during the cultivation, based on historical literature sources.

Keywords: economic, social, the forced planting (Tanam Paksa)

PENDAHULUAN

Pemerintah Kolonial Belanda melaksanakan politik Tanam Paksa (*Cultuurestelsel*) mulai tahun 1830. Tanam Paksa dilakukan sebagai upaya menutup kekosongan kas Kerajaan Belanda akibat adanya peperangan baik di daratan Eropa maupun perlawanan bangsa Indonesia, terutama perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830) di Jawa. Perlawanan Diponegro membawa korban yang sangat besar di kedua belah pihak. Di pihak pemerintah kolonial, perang ini telah menelan nyawa 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa dan 7.000 berkebangsaan Indonesia. Sedikitnya 200.000 orang Jawa tewas, sehingga penduduk Yogyakarta menyusut kira-kira separonya (Ricklefs, 2001: 257). Selain korban jiwa, Perang Diponegoro telah menghancurkan pola hubungan berbagai kerajaan di Jawa seperti Kasunanan Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman. Bahkan hubungan berbagai penguasa daerah seperti *bupati* dan *demang* di bawah kerajaan-kerajaan di atas pun terpecah dalam konflik dukung-mendukung. Dan lebih parah adalah rakyat Jawa, terutama Jawa Tengah yang mengalami penurunan jumlah penduduk untuk waktu yang agak lama. Hal ini karena sebagian besar prajurit Pangeran Diponegoro dan pengikutnya yang tewas adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungjawab nafkah kepada keluarga. Ketika kepala keluarga tewas, dan banyak pemuda yang menjadi prajurit juga tewas maka lahan pertanian tidak terurus. Akibatnya terjadi kelaparan di mana-mana.

Perang Jawa merupakan investasi tenaga manusia dan dana yang besar dalam pertarungan memperebutkan hegemoni di Jawa. Dominasi politik atas seluruh

Jawa akhirnya diperoleh pada tahun 1830 tetapi secara finansial sebaliknya, usaha ini merupakan suatu kegagalan. Andaikan ada keuntungan yang dapat diperoleh atas keterlibatan VOC di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama dua abad tak seorang pun yang berhasil memperolehnya terkecuali untuk keuntungan oknum-oknum yang telah mendapatkan kekayaan pribadi secara korup. Hanya perkebunan-perkebunan kopi di Priangan (Jawa Barat) yang merupakan usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan. Akan tetapi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sana telah habis untuk biaya militer dan administrasi. Oleh karena itu persoalan yang dihadapi pihak Belanda pada tahun 1930 adalah apakah dominasi yang akhirnya berhasil diperoleh dapat memberikan keuntungan atau tidak (Ricklefs, 2001: 259). Atas kesulitan ekonomi ini, Prof. Gerretson menyatakan bahwa dalam tahun 1830 ternyata tidak dapat diharapkan produksi ekspor dari rakyat Jawa, maka pemerintah Belanda harus memilih salah satu di antara dua stelsel, yakni stelsel tanam paksa atau memberikan tanah-tanah yang berpenduduk kepada orang-orang partikelir (tanah-tanah partikelir) (Burger, 1960: 199). Keuntungan dari Jawa diperlukan sekali selain untuk menutup biaya-biaya administrasi di Jawa, juga untuk mendukung posisi keuangan di negeri Belanda yang sedang memburuk akibat perang-perang Napoleon, hutang dalam negeri Belanda berikut bunganya yang membubung tinggi. Keadaan tetap memburuk ketika Uni Belanda-Belgia yang dibentuk oleh Konggres Wina tahun 1815 runtuh dalam revolusi Belgia tahun 1830. Usaha Belanda untuk menaklukan kembali Belgia pada tahun 1831-1832 menemui kegagalan. Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Belgia pada tahun 1839 (Ricklefs, 2001: 260). Akhirnya Pemerintah Kolonial Belanda melaksanakan Politik Tanam Paksa, terutama di Jawa.

Cultuurestelsel di Jawa ditujukan untuk mencapai 'peningkatan semaksimal mungkin produksi pertanian untuk pasar Eropa' seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pasal 41 Tahun 1934 (Husken, 1998: 75-76). Belanda memikirkan rencana untuk Jawa yaitu bagaimana memperoleh hasil daerah tropis dalam jumlah dan harga yang tepat sehingga akan memberikan keuntungan, suatu sasaran yang telah menjadi fokus pemikiran orang-orang Belanda sejak keberangkatan pelayaran mereka yang pertama pada tahun 1695 (Ricklefs, 2001: 260). Meskipun *cultuurestelsel* tidak mengadakan jenis tanaman baru dan cara pengoperasian yang masih sama dengan cara di zaman VOC, yaitu menguasai tanah, tenaga kerja dan hasil tanamannya untuk diekspor, namun *cultuurestelsel* telah menciptakan suatu tahap baru dalam eksploitasi sosial ekonomi dan transformasi terhadap pedesaan Jawa. Johannes Van den Bosch adalah konseptor sekaligus pelaksana politik Tanam Paksa yang diangkat sebagai Guberrnur Jenderal di Indonesia. Dia beranggapan bahwa pemerintah Hindia Belanda merasa dirinya sebagai pengganti raja-raja yang berhak melakukan tindakan seperti yang dilakukan raja ((Husken, 1998: 75-76).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Tanam Paksa, sebenarnya tidak begitu merugikan bangsa Indonesia. Namun penyimpangan dalam pelaksanaan politik itu telah membawa kesengsaraan bangsa Indonesia. Walaupun demikian terdapat dampak positif pelaksaaan Tanam Paksa tersebut bagi bangsa Indonesia.

KONDISI EKONOMI MASYARAKAT JAWA

Pelaksanaan *cultuuresstelsel* oleh Pemerintah Kolonial Belanda telah membawa banyak perubahan, baik bagi masyarakat Indonesia maupun negeri induk yaitu Kerajaan Belanda. Walaupun tujuan utama pelaksaaan *cultuurestelsel* untuk kepentingan negeri Belanda, tetapi pelakasanaan politik itu sendiri di Indonesia, sehingga secara umum masyarakat Indonesia lebih banyak mendapatkan akibat negatifnya.

Ricklefs mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menarik generalisasi yang pasti tentang dampak *cultuurestelsel* bagi masyarakat Jawa karena dua alasan. *Pertama*, bukti statistik dari periode ini sangat banyak tapi keandalannya seringkali meragukan. *Kedua*, sumber-sumber yang diragukan ini, meskipun begitu, cukup memadai untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan yang besar antara satu dan lain daerah di Jawa. Namun demikian, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa sementara sebagian orang menikmati keuntungan-keuntungan yang pasti, mayoritas penduduk asli Jawa mungkin merasakan masa ini sebagai zaman sulit (Ricklefs, 2001: 264).

Adanya Sistem Pengairan

Sistem irigasi yang ada di Indonesia tidak hanya berkembang pada masa setelah dilaksanakan politik Etika. Pengairan selalu berhubungan dengan pola tanam dan perkebunan yang berkembang di Jawa. Oleh sebab itu, sistem pengairan sudah berkembang sejak awal tanam paksa. Pengairan ini terutama diperuntukkan dalam penanaman tebu yang ada di dataran rendah.

Perluasan penanaman tebu menyebabkan pendirian pekerjaan-pekerjaan pengairan yang banyak sekali di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni untuk mengairi kebun-kebun tebu dan untuk mendapatkan tenaga air guna keperluan pabrik-pabrik. Saluran-saluran air baru juga dipergunakan untuk mengairi penanaman padi rakyat. Dalam pembuatan pengairan itu sering kali dipergunakan rodi dan pengerahan-pengerahan yang tidak dibayar. Karena kekurangan tenaga ahli seringkali bendungan dan tanggul-tanggul hancur. Penggunaan pengairan untuk kepentingan pabrik-pabrik, kebun-kebun tebu dan penanaman rakyat telah menimbulkan berbagai kesukaran bagi rakyat. Kesukaran ini baru berakhir ketika industri-industri tebu yang digerakkan dengan air telah diganti dengan tenaga uap. Ketel uap pertama di pasang di pabrik tebu Probolinggo pada tahun 1836 (Burger, 1960: 221).

Masyarakat Mengenal Ekonomi Uang Secara Luas

Dampak dari penananam paksa komoditi-komoditi pertanian untuk pemerintah tergolong rumit. Pengembangan gula dan perkebunan nila telah mengambil lahan, tenaga kerja dan air dari penanaman beras (sehingga merugikan penduduk setempat), tetapi memberi kesempatan untuk menjadi karyawan upahan (sehingga menguntungkan mereka). Di sebagian daerah, terutama Pasuruan, penduduk setenpat mengembangkan suatu hubungan simbiosis dengan industri gula yang menguntungkan kedua belah pihak. Di mana-mana, pembayaran pemerintah atas hasil-hasil panen dan memberi kesempatan yang lebih besar untuk menjadi buruh upahan telah meningkatkan jumlah uang yang berputar. Ini memberikan rangsangan umum terhadap perdagangan. Pertumbuhan produksi mendorong munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan-kegiatan non pertanian yang berkaitan dengan perkebunan dan perpabrikan di daerah pedalaman. Terdapat penanaman modal yang cukup besar dalam membangun infrastruktur: pabrik, gudang, jalan, jembatan, sistem pengaturana air dan fasilitas-fasilitas pelabuhan (Ricklefs, 2001: 265). Dengan semakin berkembangnya perkebunan berarti tenaga kerja petani semakin dimanfaatkan secara maksimal. Meskpun demikian perkebunan masih kekurangan tenaga kerja dan untuk mencukupinya direkrut tenaga kerja upahan. Kuli harian (*daglooner*) diperbanyak dan diperkuat oleh peraturan *glidig stelsel*, yang mengatur pengerahan tenaga kerja upahan dan konsekuensinya. Sudah tentu rekrutmen kuli menjadi tugas kepala desa atau para bekel (Suhartono, 1993: 68). Para kuli yang bekerja di perkebunan maupun pabrik dibayar dengan uang. Dengan membelanjakan uang hasil pekerjaan itu mereka mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dengan semakin banyak masyarakat yang menjadi tenaga kerja upahan (kuli) maka peredaran uang semakin meluas.

Pendorong peredaran uang yang luas di masyarakat lainnya yaitu adanya sistem sewa tanah untuk perkebunan dan perpajakan. Pada tahun 1865 pemilik tanah yang ditanami tebu harus membayar pajak tanah rata-rata 11,65 gulden tiap baunya dan mereka menerima upah tanah sekitar 34 gulden. Pada tiap bau tanah yang ditanami tebu bekerja empat orang pekerja wajib yang bersama-sama menerima sekitar 135 gulden, jadi tiap orang menerima 34 gulden. Pada waktu itu penanaman tebu memakai tanah 41.000 bau. Untuk upah tanam pada waktu itu dikeluarkan kepada rakyat sebesar 5,5 juta gulden. Untuk biaya pengangkutan dibayarkan 50 gulden tiap bau atau seluruh berjumlah 2 juta gulden. Jadi untuk upah penanaman wajib dan pengangkutan dikeluarkan biaya kepada rakyat sebesar 7,5 juta gulden. Di lain pihak, rakyat kehilangan penghasilan dari tanah yang digunakan untuk penanaman tebu, namun sebenarnya penanaman wajib tebu telah memberi keuntungan kepada rakyat dalam waktu yang lama. Karena pendapatan tanah yang ditanami tebu tidak lagi dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang, maka peredaran uang dalam kalangan rakyat mendapat kemajuan. Juga keterangan-keterangan lain yang menunjukkan meluasnya peredaran uang semasa tanam paksa. Ketika pada tahun 1834 ada keluhan karena hilangnya uang perak yang diedarkan oleh pemerintah, maka setelah diadakan penyelidikan ternyata, bahwa uang itu di pedalaman tetap beredar (Burger, 1960: 214).

Peredaran uang juga dipicu oleh mundurnya industri kain yang dikembangkan oleh orang Jawa maupun China dan naiknya daya beli masyarakat. Akibat produksi yang tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka Pemerintah Kolonial Belanda mengimpor kain dari Eropa. Harga barang impor dari Eropa relatif murah sehingga masyarakat mampu membeli barang-barang tersebut. Kebijakkan impor kain di satu sisi memperluas peredaran uang tetapi di sisi lain semakin mematikan industri kain orang-orang Jawa dan Cina.

Masyarakat Mengenal Industri Modern

Ada juga penduduk desa yang menanam tebu, memeras dan memasak sendiri air tebu dibawah pimpinan lurah dan kemudian langsung menyerahkan gulanya kepada pemerintah. Dengan begitu si petani tebu mendapat penghasilan lebih banyak dan tentu juga lurahnya. Pada paro kedua tahun 1930-an banyak keluhan dari pihak atasan mengenai kualitas gula yang dihasilkan sendiri oleh petani itu dan kemudian juga gula yang diproduksi pengusaha China secara serampangan. Sementara pengusaha Eropa mulai timbul perhatian yang lebih besar pada produksi gula. Selanjutnya pemerintah menghentikan kontraknya dengan produsen kecil Cina dan Jawa. Sejak tahun 1837 kontrak gula hanya diberikan kepada pengusaha besar. Diperkirakan pada akhir abad XIX pengusaha Jawa dan Cina di sektor gula akan habis. Apalagi pertumbuhan pabrik gula bangsa Eropa kian cepat., 1937 baru ada 5 pabrik dan menjadi 11 pabrik pada tahun 1840 (Husken, 1998: 80).

Penderitaan Akibat Eksploitasi Tanah dan Tenaga

Sebelum tanam paksa, penderitaan sebenarnya sudah dialami masyarakat Indonesia. Sistem rodi yang diterapkan Daendels (1808-1811) yang kejam menjadi penyebab penderitaan rakyat. Demikian juga kegagalan sistem sewa tanah yang diterapkan Rafles (1811-1816) menyebabkan nasib rakyat semakin tidak menentu. Namun penderitaan semakin menjadi-jadi pada masa cultuurestelsel, terutama karena eksploitasi tanah pertanian serta pengerahan tenaga petani untuk bekerja kepada pemerintah.

Setiap tahun kepala pemerintahan setempat (camat atau wedana) mengalokasikan tanah-tanah desa yang letaknya tidak jauh dari pabrik gula (setiap pabrik mendapat 200 sampai 600 bau) untuk ditanami tebu oleh penduduk. Ini dilakukan berdasarkan kerja rodi dibawah pimpinan lurah dan diawasi *Controleur* Eropa. Pembuatan kebun tebu dilakukan oleh semua warga desa yang dikenakan wajib kerja secara gotong royong. Masing-masing warga desa kemudian diberi tanggungjawab merawat dan memelihara sebidang kebun yang luasnya sekitar seperempat sampai seperlima bau per keluarga. Bukan saja penduduk dari desa yang letaknya dekat dengan pabrik dilibatkan dalam semua pengerjaan kebun-kebun tebu itu, tetapi juga dari penduduk desa-desa yang letaknya 13-18 km dari pabrik. Ini adalah pekerjaan yang banyak menguras tenaga karena selain menempuh jarak yang begitu jauh dan memakan waktu, juga pekerjaan pembuatan kebun tebu dan perawatannya diperlukan 80 – 100 hari setahun per keluarga.

Selain penduduk desa terdekat yang diwajibkan menanam dan memelihara lahan-lahan tebu, tenaga kerja dari desa yang letaknya lebih jauh dari pabrik juga digunakan. Umumnya tenaga kerja dari desa-desa lain ditugaskan untuk memotong dan mengangkut tebu, sebagian lagi melakukan kerja kuli di pabrik. Daripada mondar-mandir setiap hari berjalan kaki ke tempat kerja dengan menempuh jarak 20-45 km maka sebagian besar nereka menginap sampai berminggu-minggu lamanya (Husken, 1998: 81).

Pekerjaan-pekerjaan pengangkutan dan pekerjaan di pabrik paling memberatkan rakyat. Pengangkutan tebu menghadapi kesulitan. Jalan-jalan yang baik tidak ada. Jalan raya selatan sebagai lawannya jalan raya utara Daendels yang dirancang oleh Du Bus tidak dapat dilaksanakan pembangunannya berhubungan dengan kekurangan uang. Jalan-jalan simpang yang direncanakan tak pernah selesai pembuatannya. Gerobak-gerobak dan binatang–binatang penarik yang dipergunakan oleh desa-desa tak mencukupi pengangkutan hasil-hasil tanaman yang banyak itu. Di Tegal mula-mula tebu dipikul oleh orang-orang ke penggilingan-penggilingan (Burger, 1960: 211).

Pada dasarnya semua pemilik tanah sawah di desa (termasuk para *sikep* dan tokoh desa yang disegani) dikenakan kerja wajib. Yang dibebaskan hanya petinggi, lurah, anggota pengurus desa dan beberapa orang lainnya seperti kyai, kaum santri, guru, orang yang berusia lanjut, orang cacat, bekas pimpinan desa dan pengikut setia para pejabat. Secara keseluruhan berarti tiga perempat dari semua penduduk desa dibebani kerja wajib. Namun demikian, tidak perlu setiap orang melakukan sendiri kerja wajib ini karena ia dapat digantikan orang lain dengan imbalan uang atau oleh seorang pembantu di rumah tangganya. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan oleh penduduk desa yang kaya (Husken, 1998: 82). Kerja wajib sebenarnya telah ada sebelum kedatangan bangsa barat. Pada masa pemerintahan kerajaan berlaku kerja wajib bagi *sikep* yang dibedakan menjadi: a) *kerigaji*, kerja wajib untuk raja dan para patuh; b) kerigan, kerja wajib untuk desa; c) *gugur gunung*, kerja wajib untuk desa jika terjadi bencana. Kerja wajib seperti di atas oleh perkebunan diperluas menjadi kerja *intiran* atau *cultuurdiensten* yang jumlah jam kerjanya diatur oleh perkebunan (Suhartono, 1993: 82). Pengaturan-pengaturan yang ketat oleh perkebunan di bawah pengawasan pejabat-pejabat Belanda inilah yang sesungguhnya memberatkan masyarakat. Ketika masa kerajaan, kerja wajib dilakukan secara sukarela penuh dengan keikhlasan sebagai bentuk pengabdian rakyat kepada raja, sehingga terasa ringan. Sebaliknya pada masa tanama paksa, kerja wajib dalam bentuk eksploitasi tenaga dengan penuh paksaan dan aturan sehingga sangat memberatkan masyarakat.

Fakta lain atas penderiraan muncul ketika Penjabat Gubernur Jenderal, Jean Chretien Baud mengadakan kunjungan inspeksi ke seluruh Jawa pada tahun 1834. Menurut pendapatnya residen Jepara terlalu terburu-buru melaksanakan *cultuurestelsel* tanpa mempertimbangkan apakah keadaan tanah di karesidenannya memungkinkan perluasan yang diperlukan. Karena kesembronoan ini telah menimbulkan kegagalan dan kekecewaan. Karena berlaku ketentuan bahwa resiko ditanggung oleh penanam, maka kerugian terutama tertimpa pada penduduk pedesaan (Husken, 1998: 77).

Eksploitasi tenaga kerja dan penggunaan tanah-tanah penduduk tidak sama untuk setiap daerah. Tenaga yang banyak dipergunakan dalam sistem tanam paksa adalah Jawa dan Sunda. Di luar daerah-daerah untuk tanaman kopi (yang tumbuh di daerah yang tidak dapat ditanami padi) maka untuk seluruh Jawa hanya 6% yang dijadikan tanah garapan pada tahun 1840 dan 4 % pada tahun 1850. Ada perbedaan yang besar antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, tetapi angka-angka resmi yang tertinggi adalah untuk Bagelen dan Pekalongan, dimana 15 % dari tanahnya diperuntukkan bagi tanaman untuk pemerintah pada tahun 1840. Akan tetapi investasi tenaga kerja jelas sangat besar. Angka-angka statistik untuk *cultuurestelsel* tidak dapat dipercaya rinciannya karena banyaknya laporan yang memperkecil angkanya. Angka-angka yang dilaporkan oleh Fasseur, yang tidak dikoreksi, menunjukkan bahwa 57% dari jumlah penduduk Jawa terlibat dalam penanaman komoditi-komoditi pertanian pemerintah pada tahun 1840, dan 46 % pada tahun 1850. Dengan memperhatikan laporan yang memperkecil angka, Van Niel memperkirakan bahwa selama kurun waktu 1837-1851, lebih dari 70% keluarga petani menghasilkan komoditi-komoditi ekspor, lebih dari separonya kopi. Beban yang sangat besar ini tersebar secara tidak merata. Angka-angka Fasseur yang tidak dikoreki, menunjukkan bahwa di beberapa daerah, jumlah penduduk yang terlibat jauh lebih sedikit dari separonya, akan tetapi angka untuk Banten pada tahun 1840 adalah 92%, dan untuk Kedu pada tahun 1845 adalah 97%. Elson menghitung bahwa pada tahun 1840, 73% dari seluruh keluarga petani dimanfaatkan untuk melakukan penanaman, dimana untuk daerah Banten, Banyumas dan Kedu angkanya mencapai 100% dan dibeberapa daerah lainnya kurang dari 50%. (Ricklefs, 2001: 263) Di Kabupaten Pati saja hampir separo jumlah rumah tangga dan 70% bagi desa (termasuk distrik-distrik miskin di selatannya) telah dilibatkan dalam satu atau jenis tanaman (Husken, 1998: 77). Di kebanyakan tempat, kopi benar-benar merupakan hasil terbesar, tetapi di Pekalongan, Tegal, Jepara, Madiun, Pasuruan dan Surabaya, gulalah komoditi utama (Ricklefs, 2001: 263).

Pada tahun 1840, tanda-tanda penderitaan di kalangan orang Jawa dan Sunda mulai tampak, khususnya di daerah-daerah penanaman tebu. Batang tebu ditanam di tanah yang sama untuk penanaman padi. Waktu yang diperlukan untuk tumbuhnya tebu dan menuainya, disusul dengan persiapan lahan bagi penananan padi, telah mempersulit tercapainya pergiliran yang konstan bagi kedua komoditi tersebut. Pabrik-pabrik gula juga bersaing dengan pertanian padi untuk jatah air. Nila juga menciptakan masalah, gizi tanah menjadi terkuras sehingga mengakibatkan tanaman padi buruk beberapa tahun setelah lahan di tanami nila. Terjadilah kekurangan beras. Harganya menjadi bergejolak di mana-mana, yang paling kuat terjadi pada tahun 1930-an dan 1840-an. Namun kelaparan kelaparan yang melanda Jawa lebih disebabkan oleh kemelaratan petani dan keserakahan orang-

orang yang memegang kekuasaan ketimbang oleh kelangkaan beras, karena sering kali beras tersedia (tidak jarang digudangkan oleh para elit lokal dan pedagang Cina yang menginginkan harga lebih tinggi) tapi petani tak sanggup membelinya.. Pada tahun 1844 terjadi gagal panen besar-besaran yang diikuti oleh kelaparan di Cirebon. Wabah-wabah penyakit khususnya tipus, berjangkit pada tahun 1846-1850, dan kelaparan meluas di Jawa Tengah sekitar tahun 1849-1850. Sementara itu pemerintah menetapkan kenaikan pajak tanah dan pajak-pajak lainnya secara drastis. Kepergian penduduk dari desa-desa mengakibatkan semakin turunnya hasil pertanian padi (Ricklefs, 2001: 266-267).

KONDISI SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

Korupsi Pejabat Lokal dan Asing

Struktur administrasi *cultuurestelsel* sesuai dengan konservatisme kebijakan Belanda yang baru setelah tahun 1830. Percobaan-percobaan terdahulu dengan langsung berhubungan dengan petani ditinggalkan, dan desa menjadi unit dasar pemerintahan. Kepala desa merupakan mata rantai antara petani dan pejabat-pejabat bangsa Indonesia yang lebih tinggi tingkatannya, yang mencapai puncaknya kepada bupati (yang disebut *regent* oleh Belanda), yaitu seorang bangsawan yang mengepalai kabupaten. Bupati bertanggungjawab kepada pemerintahan bangsa Eropa, tetapi para pejabat bangsa Eropa juga terlibat pada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah. Untuk pertama kalinya kehadiran para pejabat bangsa Eropa di tingkat desa menunjukkan kepada rakyat Jawa biasa bahwa hidup mereka dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Para pejabat baik yang berkebangsaan Belanda maupun Indonesia, yang ditugaskan melaksanakan skema baru tersebut dibayar berdasarkan prosentase dari komoditi pertanian yang diserahkan. Ini merupakan sumber korupsi yang subur dan perangsang munculnya tuntutan-tuntutan yang bersifat memeras terhadap desa-desa. Korupi dan penyelewengan merajalela. Hasil-hasil bumi ditafsir terlalu kecil, perdagangan swasta di bidang komoditi pertanian pemerintah semakin meningkat, dan traksaksi yang curang berkembang di kalangan pejabat-pejabat pribumi, orang-orang Belanda dan para pengusaha China (Ricklefs, 2001: 262).

Bagi kalangan elit bangsawan di seluruh Jawa, tanam paksa merupakan zaman yang benar-benar menguntungkan. Kedudukan mereka menjadi lebih aman dan penggantian secara turun temurun untuk jabatan-jabatan resmi menjadi norma, terutama setelah dikeluarkannya Konstitusi 1854. Mereka sering kali membuat keuntungan yang besar dari persentase yang dibayarkan atas penyerahan-penyerahan hasil bumi. Akan tetapi, mereka tergantung secara langsung pada kekuasaan Belanda untuk kedudukan dan penghasilan mereka, dan harus melakukan pemaksaan kepada petani yang terbukti sangat diperlukan bagi berfungsinya *cultuurestelsel*. Mereka semakin sering menjadi sasaran pengawasan dan campur tangan para pejabat Belanda. Mereka terpisah dari masyarakatnya sendiri, terbebas dari tekanan sanksi-sanksi pribumi sebelumnya bila menyelewengkan kekuasaan, dan sama sekali tidak merasa terpanggil untuk melakukan modernisasi (Ricklefs, 2001: 264).

Muncul Pekerja Upahan (Kuli)

Sebelum pelaksanaan tanam paksa, masyarakat desa umumnya hanya bekerja sebagai petani, sedikit tukang dan peternak sambilan. Mereka hidup dalam suasana keharmonisan dalam pengendalian elit lokal kerajaan. Belanda sebagai penjajah tidak langsung berhubungan dengan penduduk, melainkan hanya dengan pejabat lokal. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dengan penguasa lokal tidak berubah sejak lama, seperti ketika kerajaan-kerajaan masih berdaulat. Kerja wajib maupun upeti menjadi kewajiban yang sudah turun temurun. Masyarakat menjalaninya dengan penuh kepatuhan tanpa banyak 'pembantahan', karena menganggap bahwa hidup adalah pengabdian kepada raja.

Seiring pelaksanaan tanam paksa yang semakin masuk ke daerah-daerah, harmoni kehidupan desa terganggu. Kehidupan masyarakat semakin tertekan, bukan saja oleh penguasa lokal, tetapi juga oleh penguasa Belanda yang terjun langsung ke daerah. Apalagi para penguasa lokal dibebani target-target penghasilan tertentu, sehingga semakin memaksa masyarakat untuk memenuhi target itu. Kepala desa sebagai pejabat paling rendah seringkali mengalami kesulitan. Di satu sisi harus setia kepada pejabat di atasnya, di sisi lain dia berada di tengah-tengah masyarakat yang mestinya diperjuangkan dan dibelanya. Kepala desa banyak yang memilih setia kepada pejabat di atasnya walaupun dimusuhi oleh masyarakatnya sendiri, bahkan oleh para *kecu* dan *bandit*. Mereka sebagai sasaran perlawanan bandit.

Untuk mencegah para bandit di pedesaan kepala-kepala desa mengalami kesulitan, karena sebenarnya mereka ibarat air dan ikan. Bagaimana seharusnya mereka berpihak. Para kepala desa itu mencari jalan tengah yaitu dengan melakukan semacam *gentleman agreement* dengan para bandit. Mereka mengadakan komunikasi yang saling menguntungkan dan pura-pura tidak tahu rencana perampokan yang dilakukan para bandit. Mereka tidak saling mengganggu agar saling mendapat untung. Para kepala desa tidak disalahkan oleh penguasa kolonial dan para bandit berhasil mencapai tujuannya dan mengenai sasarannya (Suhartono, 1993: 112). Hal inilah yang memunculkan kelompok-kelompok bandit, bukan saja sebagai bentuk perlawanan kepada penguasa asing, tetapi banyak yang menjelma menjadi pekerjaan yang turun temurun.

Pekerjaan lain yang muncul adalah pekerja upahan (*kuli*). Kuli hampir di semua daerah, terutama yang terdapat pabrik-pabrik tebu, termasuk di Karesidenan Jepara. Meraka yang dilibatkan dalam produksi tebu dan gula itu mendapat bayaran: pada tahun 1855 setiap penanam mendapat rata-rata 19 gulden sebagai upah tanam (*pantloon*) dan 20-23 gulden dibayar bagi setiap pemotong tebu permusim. Pemotong diharuskan membawa gerobak sapinya sendiri untuk mengangkut tebu-tebu itu ke pabrik. Yang terparah adalah mereka diperkerjakan sebagai kuli di pabrik. Untuk pekerjaan sangat berat itu seseorang dibayar paling sedikit tidak lebih dari 6-8 gulden permusim giling. Sebagian dari mereka ini merupakan pekerja upahan harian, terdiri dari para petani yang tidak mempunyai tanah sendiri (*tunakisma*) dan dikerahkan dari desa-desa lain. Selain itu juga terdapat pekerja musiman yang didatangkan dari desa-desa miskin di sekitar Karesidenan Jepara seperti dari Semarang, Demak dan Grobogan. Di mata kolonial, mereka tidak lebih dilihat sebagai pekerja gelandangan. Tentang ini Residen Jepara melaporkan : yang dikatakan pekerja ":sukarela" dari luar Kabupaten Jepara itu adalah lapisan penduduk yang terdiri dari bermacam-macam perangai dan sering berurusan dengan polisi (Husken, 1998: 82).

Pekerja musiman disebut juga *pengembara*. Mereka digambarkan sebagai masyarakat yang sering tersangkut masalah polisi. Orang-orang itu tidak dapat dipercayai. Seringkali mereka pergi karena alasan yang tidak berarti dan demikian pula mereka datang dengan sekonyong-konyong. Rakyat pengembara ini dalam urusan susila biasanya terbelakang dari rakyat desa yang menetap; dikatakan bahwa rakyat pehgembara ini mendapat kebahagiaan yang terbesar dalam berjudi, ronggeng yang menggairahkan dan candu. Lama sekali pengembara-pengembara ini merupakan bagian terbesar dari pekerja-pekerja perusahaan (Burger, 1960: 213).

Mereka tidak menetap di satu tempat, tetapi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dikenal sebagai *wong bara* (*volksomloop*). Laporan kolonial menyebut bahwa setiap tahun jumlah pengembara semakin meningkat. Di antara mereka ada yang kembali ke desa pada musim panen tetapi banyak juga yang tidak kembali dan menetap di tempat lain. Para kuli mengalami kehidupan yang tidak menentu, upah sangat rendah, kebutuhan meningkat dan kebutuhan konsumtif menjerat mereka dan mendorong mencari tambahan pendapatan dengan cara pintas. Rumah madat, tempat judi dan *koplakan* dijadikan tenpat mengkonsumsikan upahnya. Keadaan seperti ini mempercepat ia mengambil keputusan untuk bergabung dalam perbanditan (Suhartono, 1993:113). Hal ini menunjukkan bahwa pekerja kuli sangat terhina dan tidak dihargai sama sekali. Mereka dianggap sebagai orang buangan. Berperangai jahat bahkan sebagai sampah masyarakat. Padahal sesungguhnya mereka pada awalnya adalah para petani yang direkrut oleh para kepala desa, baik secara sukarela maupun dipaksa untuk dipekerjakan di tempat yang jauh dari desanya. Bahkan banyak di antara mereka sebenarnya berasal dari petani yang tertekan oleh beratnya pajak dan kerja wajib. Sawah garapannya *kadhedhel* karena *kether* membayar layanan *patuh* sehingga ia dikeluarkan dari desa atau meninggalkan desa. Ia tinggal di tengah *bulak* yang jauh dari desa, maka dari itu ia disebut *wong anginan*, orang dibawa angin yang tidak jelas tempat tinggalnya (Suhartono, 1993: 112).

Munculnya Gerakan Sosial

Banyaknya eksploitasi tenaga kerja serta tanah pertanian menyebabkan penderitaan rakyat semakin berat. Bagi para petani yang menjadi buruh upahan di pabrik-pabrik secara umum ekonomi mereka relatif baik. Namun petani tidak mempunyai kesempatan mengerjakan tanahnya, atau tanahnya dijadikan perkebunan pemerintah maka penderitaanlah yang terjadi. Oleh sebab itu muncullah berbagai macam reaksi dari masyarakat Jawa.

Salah satu reaksi adalah dengan cara berpindah jauh dari desanya untuk menghindari beban-beban atau untuk mencari pekerjaan. Upaya penghindaran diri digambarkan dilakukan oleh masyarakat Jepara. Ramai-ramai menyingkirkan diri, lari dan migrasi kaum lemah di Jawa bila tekanan tuntutan pihak yang berkuasa sudah terlampau berat menimpa diri mereka. Sejak tahun-tahun pertama *cultuurestelsel* sudah terjadi penyingkiran diri dari beberapa ribu petani dari Kabupaten Jepara. Ini menyulitkan pemerintah karena kehilangan tenaga kerja yang begitu diperlukan bagi perkebunan tanam paksa. Pada tahun 1841 kesulitan itu timbul kembali dengan perpindahan penduduk dalam jumlah besar, pada enam bulan pertama tahun itu sudah sekitar 2.000 petani menyingkir ke daerah sebelah selatan Kabupaten Grobogan, daerah yang tidak terlibat tanam paksa dan juga tanpa adanya kerja rodi. Arus perpindahan ini berjalan terus (Husken, 1998: 112).

Bentuk-bentuk perlawanan lain juga terlihat seperti sabotase, tindakan-tindakan kekerasan perseorangan, dan demonstrasi-demonstrasi protes secara bersama. Ini terjadi di daerah-daerah yang memiliki tangungjawab besar untuk menghasilkan komoditi-komoditi pertanian untuk pemerintah maupun di daerah yang memiliki tanggungjawab sedikit atau yang tidak memililiki sama sekali. Ini menunjukkan bahwa banyak persoalan yang dirasakan rakyat Jawa muncul lebih karena kondisi umum kebijakan pemerintah Belanda dari pada karena pengaturan-pengaturan khusus dalam rangka *cultuurestelsel* (Ricklefs, 2001: 266).

Sementara itu Sartono Kartodirjo memandang bahwa fenomena sejarah pergolakan di daerah pedesaaan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan asing ternyata bersifat endemis, lokal, pendek umurnya serta tradisional. Frekuensi meluasnya pergolakan di seluruh Jawa cukup tinggi, pada dekade tertentu hampir setiap tahun, seperti tahun-tahun 1820-an, 1860-an, 1880-an: di beberapa daerah lebih menonjol, seperti di Banten, Tanah Partikelir, Cirebon, daerah Hilir Sungai Brantas dan sebagainya. Meskipun frekuensi pergolakan di Jawa cukup tinggi, tetapi dampaknya tidak besar, tidak lain karena pada hakekatnya ternyata sempit ruang lingkupnya dan terisolasi. Gerakan yang tradisional tidak mampu meluaskan jaringan organisasinya, basis komunitasnya tetap unit sosial tradisional ialah komunitas desa, keluarga dan lembaga tradisional-religius (Kartodirjo, 1981: xiii).

Menurut Suhartono, ada tiga kategori gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Belanda dan elit lokal. *Pertama*, gerakan dengan ideologi *mesianisme* yang mengadung harapan datangnya zaman adil dan makmur. Zaman itu didatangkan oleh Ratu Adil atau Imam Mahdi karena memiliki kharisma yang dapat dijadikan dasar kekuasaanya. Gerakan Ratu Adil merupakan kontra-ideologi terhadap raja sebagai penguasa yang sudah barang tentu mengancam kedudukan penguasa. *Kedua* adalah gerakan bercorak *nativisme*. Gerakan ini tidak dapat dipisahkan dari besarnya kekuasaan asing sehingga menciptakan reaksi kuat untuk melenyapkannya. Meluasnya kekuasaan asing berarti merosotnya ketertiban di berbagai bidang kehidupan. Sudah barang tentu pengusiran orang asing termasuk sekutunya menjadi tujuan utama gerakan itu karena mereka membentuk kelompok penguasa. Sedangkan kategori *ketiga* adalah gerakan protes perorangan yang terdapat di pedesaan. Munculnya gerakan ini merupakan pelampiasan frustasi karena tekanan-tekanan dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Berdasarkan ideologi yang dianutnya disertai keberanian dan *kekebalan* mendorong pemimpin gerakan melakukan protes terhadap perusahaan perkebunan. Selain gerakan perlawanan yang bersifat terogrnisir, terdapat bentuk perlawanan yang dilakukan secara perseorangan. Jenis-jenis gerakan sosial perseorangan yang terjadi di pedesaan antara lain per*kecu*an, pem*begal*an, pembakaran, pencurian ternak dan pembunuhan (Suhartono, 1991: 140-165). Umumnya para *kecu* atau *bandit* terorganisir dengan baik dan mempunyai markas dan pimpinan yang disebut *benggol kecu*.

Di daerah Yogyakarta pada masa pemerintahahn Sultan Hamengku Buwono V (1828-1855) terdapat nama beberapa *beggol kecu* ulung yang melakukan aksinya di daerah Bantul. Mereka dikenal karena *kawedhugan*nya dan *kedigdayaan*nya yang ditunjukkan dengan nama yang dipakai seperti *Penthung Pinanggul, Gobang Kinosek*, *Kandhang Winongkeng*, *Dadhung Sidedel* dan sebagainya. Di Surakarta terdapat *benggol kecu Jodongso*, di Sragen ada *Singobarong* yang beroperasi di daerah Klaten, Boyolali dan Sukoharjo. Sasaran dalam perbanditan pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, bangunan dan lahan antara lain gedung, gudang, kebun, barak, bedeng, saluran irigasi dan lain-lain. *Kedua*, person atau otang-orang baik orang asing maupun pribumi yang melakukan eksploitasi dan membantunya. Mereka adalah tuan tanah partikelir (*landbeer*), penyewa tanah (*landbuurder*), *renternier* dan *pachter* Cina, para kepala desa, *demang, rangga, ngabehi, petinggi, bekel*, dan petani kaya serta pedagang kaya (Suhartono, 1993: 109-111)

Gerakan sosial dan perlawanan perseorangan memang tidak mampu mengusir bangsa asing, namun mampu menciptakan gangguan walaupun dalam skala lokal. Gerakan sosial umumnya sebagai reaksi orang lemah karena tidak mampu melawan secara terbuka. Beratnya penderitaan masyarakat menyebabkan frustasi sehingga melakukan apa saja yang dapat dijadikan pelampisaan kejengkelan.

PENUTUP

Politik Tanam Paksa (*cultuurestelsel*) bertujuan untuk menutup kas Kerajaan Belanda yang kosong akibat banyak peperangan baik di Eropa maupun di Indonesia. Oleh karena itu para pelaksana *cultuurestelsel* berupaya agar masyarakat Indonesia menghasilkan komoditi ekspor dengan cara penanaman wajib dan kerja wajib di bawah pengawasan pejabat lokal maupun pejabat kolonial.

Akibat adanya penanaman wajib dan kerja wajib ini sangat luas dalam seluruh aspek